

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia kini tengah menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayang sebelumnya diakibatkan oleh *novel coronavirus disease* (COVID-19). Sejak ditetapkan sebagai pandemi global pada maret 2020 (WHO 2021), COVID-19 telah membawa kehilangan yang dramatis bagi kehidupan manusia diseluruh dunia. Tatangan luar biasa dari sektor kesehatan, ekonomi dan distribusi bahan pangan. Selama lebih dari satu tahun virus corona telah menginfeksi lebih dari 183 juta penduduk dunia, dengan angka kematian 3,9 juta jiwa (worldometer 2021). Di Indonesia sendiri kasus covid-19 telah melebihi angka 2,2 juta dengan angka kematian 58 ribu jiwa (worldometer 2021).

Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi usaha mikro. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian (Aknolt 2020).

Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya

masalah pembayaran hutang atau kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank

Mengacu pada data OECD (2020) disebutkan bahwa usaha mikro saat ini berada dalam pusat krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 bahkan dengan kondisi lebih parah dari krisis keuangan 2008 (Sugiri 2020). Krisis akibat pandemi akan berpengaruh pada usaha mikro dengan risiko serius dimana lebih dari 50% usaha mikro tidak akan bertahan beberapa bulan ke depan. Kemunduran situasi keuangan usaha mikro dapat memiliki efek sistemik pada sektor perbankan secara keseluruhan (OECD, 2020).

Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak usaha mikro kesulitan melunasi pinjaman serta biaya bulanan, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami usaha mikro, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Berikut adalah jumlah usaha mikro yang berada di Kota Jambi pada tahun 2017 – 2021.

Tabel 1.1. Perkembangan Usaha Mikro di Kota Jambi Tahun 2017 – 2021

Tahun	Usaha Mikro (Unit)	Perkembangan (%)
2017	8.542	-
2018	7.257	-15.04
2019	7.257	0.00
2020	5.563	-23.34
2021	44.307	696.46
Rata – Rata		164.52

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan bahwa perkembangan usaha mikro di Kota Jambi berfluktuasi rata-rata meningkat sebesar 164.52 persen, penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai 23.34 persen, peningkatan tertinggi pada tahun 2021 yaitu mencapai 696.46 persen, pertumbuhan usaha mikro di Kota Jambi terjadi penurunan akibat adanya pandemi Covid 19 yang melanda setiap daerah yang menyebabkan merosotnya perekonomian pada tahun 2020, tetapi pada tahun 2021

perekonomian mulai bangkit kembali dengan adanya transisi pasca pandemi dengan dibuktikannya meningkatnya usaha mikro untuk menompang perekonomian. Sebagaimana diketahui pemerintah pada saat ini harus fokus dan peduli terhadap pengembangan usaha mikro melalui program-programnya, dan juga masih berupaya keras untuk mengatasi pandemi Covid-19 tersebut agar jumlah usaha mikro tidak terus mengalami penurunan atau mengalami gulung tikar, maka dari itu mengenai permasalahan ini pemerintah melalui pihak perbankan membantu dengan penyaluran Bantuan keuangan agar usaha mikro masih tetap bertahan di masa pandemi ini.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan keuangan kepada usaha mikro melalui Bantuan Presiden (Banpres) Produktif usaha mikro (BPUM) yang kemudian di distribusikan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota. Bantuan ini pertama kali diberikan pada tahun 2020 dengan nominal sejumlah 2,4 juta per usaha mikro. Pemerintah bersama dengan ekonomi Universitas Indonesia melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, dan terbukti Program BPUM tahun 2020 efektif untuk membantu pelaku usaha mikro yang terdampak covid 19. Sehingga, BPUM diberikan kembali pada tahun 2021 dengan bantuan sebesar 1,2 juta.

Sebagai sarana koordinasi pelaksanaan program BPUM 2021, telah dibentuk kelompok kerja (Pokja) pada Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro di seluruh Indonesia agar dapat memaksimalkan usulan calon penerima BPUM khususnya di daerah-daerah yang masih rendah realisasi penerima BPUM pada tahun anggaran 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi usaha mikro menjadi hal yang penting. Urgensi inilah yang melatarbelakangi pemerintah untuk merasa perlu dalam memberikan bantuan keuangan kepada usaha mikro dalam menghadapi pandemi. Berbagai upaya dan program yang telah diinisiasi oleh pemerintah perlu diperkuat dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk sektor swasta agar dapat semakin memberikan manfaat yang optimal bagi usaha mikro salah

satunya adalah Banpres Produktif Usaha mikro (BPUM) bagi pelaku usaha mikro di Kota Jambi. usaha mikro diharapkan untuk terus bersaing, meski ditengah kondisi pandemi.

Dampak positif dari bantuan pemerintah berupa modal usaha dapat meningkatkan pendapatan usaha sehingga menambah pemasukan pada usaha yang dijalankan. Pendapatan merupakan faktor faktor utama dimana kita mampu mengetahui suatu usaha mengalami perkembangan dalam usahanya atautkah mengalami penurunan dalam usahanya, seperti halnya yang terdapat pada informan pertama dengan sebelum adanya pandemi covid 19 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 8.000.000 saat terjadi pandemi pendapatan tersebut menurun menjadi Rp.4.500.000, sehingga hal ini membuktikan bahwa dengan terjadinya pandemi tersebut mampu menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat, maka pemerintah berupaya untuk membantu perekonomian masyarakat dengan bantuan langsung tunai yaitu BPUM yang bertujuan untuk membantu pendanaan modal usaha, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi usaha mikro di Kota Jambi, khususnya masalah keuangan. Sebagaimana disadari bahwa keberhasilan suatu usaha bank antara lain bertumpu pada kemampuan dan kecukupan dalam mengatur keuangan atau *cash flow*. Hubungan Kredit Investasi terhadap usaha mikro dapat digunakan untuk membangun atau memperluas kegiatan dalam usaha dan hubungan Kredit Modal Kerja terhadap usaha mikro digunakan untuk meningkatkan produksinya seperti pembelian bahan baku, membayar gaji pegawai dan lain sebagainya.

Di Kota Jambi, pelaksana teknis BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) adalah Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi. Kepala Seksi Fasilitas dan Kemitraan usaha mikro Disnakertrans Kota Jambi pada tahun 2021 pencairan dilakukan selama tiga tahap yaitu pada bulan April, Juni dan Agustus. Penyaluran

bantuan dilakukan melalui Bank BRI. Nominal bantuan pada tahun anggaran 2021 yaitu sebesar 1,2 juta.

Tabel 1.2. Jumlah Penerima BPUM Kota Jambi tahun 2021 (Unit)

No	Kecamatan	Jumlah Penerima BPUM	Persentase
1	Alam Barajo	364	4.50
2	Danau Sipin	253	3.13
3	Danau Teluk	484	5.99
4	Jambi Selatan	921	11.39
5	Jambi Timur	1.335	16.51
6	Jelutung	340	4.21
7	Kota Baru	1.070	13.23
8	Paal Merah	477	5.90
9	Pasar Jambi	315	3.90
10	Pelayangan	603	7.46
11	Telanaipura	1.923	23.78
	Kota Jambi	8.085	100.00

Sumber : Bank BRI Cabang Jambi, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa usaha mikro yang menerima bantuan BPUM di Kota Jambi pada tahun 2021 sebanyak 8.085 unit usaha, bantuan BPUM yang disalurkan melalui pihak Bank BRI, bantuan BPUM yang terbanyak diterima berada di Kecamatan Telanaipura yaitu mencapai 23,78 persen, sedangkan kecamatan yang terendah dalam menerima bantuan BPUM adalah Kecamatan Danau Sipin, bantuan BPUM berguna untuk menambah modal usaha dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Imelda. 2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan BPUM dalam meningkatkan pendapatan pedagang dimasa pandemi covid-19 pada tahun 2020 di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur sudah terlaksana secara efektif pada indikator integrasi dan adaptasi. Hal serupa juga dengan penelitian oleh (Hastuti, 2021) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha konveksi sebelum dan sesudah memperoleh fasilitas program BPUM secara parsial jumlah produksi usaha konveksi memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap profit usaha konveksi di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

Dinas Koperasi dan UMKM yang bekerjasama dengan perbankan salah satunya adalah Bank BUMN merupakan tempat diadakannya pemberian bantuan modal usaha yang diberikan secara gratis dengan syarat yang diberikan betul-betul digunakan dalam pengembangan usaha yang dijalankan, pemberian bantuan kepada pelaku usaha ini berupa uang sehingga sebagai penambahan modal sendiri yang dimiliki, penerima bantuan hanya mereka yang layak diberikan bantuan.

Keberhasilan BPUM tahun 2020 menjadikan pemerintah melakukan bantuan serupa untuk tahun 2021, melalui riset yang dilakukan kepada penerima bantuan. Namun, terdapat perbedaan nominal bantuan antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Jumlah bantuan tahun 2021 lebih sedikit dibanding dengan tahun 2020, yakni turun sebesar 50%. Melalui program tersebut diharapkan pelaku usaha mikro akan terbantu sehingga tidak ada lagi kesulitan modal atau dalam hal pembelian bahan baku dan lain-lain. Dari program tersebut, muncul pertanyaan apakah BPUM bermanfaat dan berguna untuk membantu usaha pelaku usaha mikro bertahan di masa pandemi. Dan juga apakah dengan adanya BPUM berpengaruh atau tidak terhadap pendapatan pelaku usaha mikro.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bantuan keuangan pemerintah melalui BPUM kepada usaha mikro sebelum dimasa pandemi Covid-19 dengan mengangkat penelitian yang berjudul **“Determinan Pendapatan Usaha Mikro Penerima Bantuan Modal Usaha dari Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Jambi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi pendapatan usaha mikro penerima bantuan modal usaha pemerintah?

2. Bagaimana perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan BPUM bagi pelaku usaha mikro di Kota Jambi pada masa pandemic Covid 19?
3. Bagaimana pengaruh bantuan pemerintah berupa modal usaha terhadap pendapatan usaha mikro di Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha mikro penerima bantuan modal usaha pemerintah
2. Untuk menganalisis perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan BPUM bagi pelaku usaha mikro di Kota Jambi pada masa pandemic Covid 19.
3. Untuk menganalisis pengaruh bantuan pemerintah berupa modal usaha terhadap pendapatan usaha mikro di Kota Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademisi
Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi peminat dan pengembang usaha mikro.
2. Manfaat Praktisi
Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi ilmiah dan acuan sebagai pengambil keputusan bagi pemerintah Kota Jambi khususnya pada instansi Dinas Koperasi dan UMKM untuk pengembangan usaha mikro.